

# EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA TIDAK MAMPU OLEH ADVOKAT

(Studi di PERADI Cabang Malang)

**Farina Warapsari, Dr. Ismail Navianto, SH, MH, Paham Triyoso, SH,  
M.Hum.**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email : [farinawarapsari@yahoo.com](mailto:farinawarapsari@yahoo.com)**

## Abstrak

Indonesia menjamin hak semua warga negaranya untuk diperlakukan sama dihadapan hukum. Salah satu kewajiban advokat sebagai aktor penegak hukum adalah memberikan jasa bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu secara cuma-cuma. Undang-undang dan kode etik telah mengatur ketentuan terkait pemberian bantuan hukum tersebut. Kenyataannya saat ini citra advokat justru dipandang sebagai profesi yang komersial. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat di PERADI Cabang Malang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian, seluruh data yang ada diolah secara deskriptif kualitatif. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yaitu berasal dari advokat sendiri maupun dari masyarakatnya. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut berupa sosialisasi melalui berbagai media dan peningkatan kualitas sumber daya advokat yang profesional.

Kata kunci: efektivitas, bantuan hukum, terdakwa tidak mampu, advokat

## Abstract

*Indonesia ensures its people to be treated fair under Indonesian law. One of advocates' obligations as law enforcement is giving legal aid to people who are not financially capable. Law and code ethics are already regulate things related to legal aid. But the fact is, the current image of the advocates is viewed as commercial profession. The purpose of this study is to know how far the effectiveness of giving legal aid to defendants who are not financially capable by advocate at PERADI Cabang Malang. This paper uses empirical juridical methods with sociological juridical research methods. Then each data will be processed by*

*descriptive qualitative. There are some obstacles in the realization of giving legal aid to defendant who are not financially capable, both from the society or from the advocates. Some efforts were done as well to anticipate the obstacles that happened, including socialization by media and quality resources development on professional advocates.*

*Keywords: effectiveness, legal aid, defendant who are not financially capable, advocates*

## **A. PENDAHULUAN**

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain.

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum” disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya. Pada prakteknya, kedudukan terdakwa itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat untuk membantu terdakwa agar proses peradilan seimbang..

Kewajiban advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Pasal 7 angka 8 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, “Advokat mempunyai

kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu.”<sup>1</sup>

Hal ini dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut.<sup>2</sup>

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kota Malang sebagai salah satu kota besar yang penduduknya berasal dari berbagai lapisan sosial memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai masalah hukum terutama tindak pidana baik sebagai pelaku kriminal maupun korban kejahatan. Rata-rata pelaku kriminal itu memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang rendah. Tuntutan biaya hidup saat ini yang semakin tinggi memaksa mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh uang secara instan agar dapat bertahan hidup seperti menjadi pengedar narkoba, pencuri atau perampok. Mereka yang terlibat tindakan kriminal nantinya akan berhadapan dengan hukum dan apabila dituntut hukuman lima tahun atau lebih seorang tersangka atau terdakwa wajib didampingi advokat dalam menjalani serangkaian proses hukum tersebut.

Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Profesi Advokat semakin menjadi tempat mencari keuntungan dan bukan lagi sebagai sarana perjuangan membela hak-hak rakyat miskin.

---

<sup>1</sup>Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), **Kode Etik Advokat Indonesia**, Jakarta Selatan, 2013, hlm. 12.

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menarik untuk diteliti, mengingat jaman sekarang ini sudah sulit ditemui seseorang yang mau melakukan pekerjaan tanpa memperoleh imbalan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Malang?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Malang?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari wawancara guna menjawab permasalahan penelitian serta difokuskan pada suatu aturan hukum yang dihubungkan dengan kenyataan di lapangan tentang efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dimana pendekatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberlakuan hukum terhadap masyarakat, dalam hal ini pemberlakuan hukum terkait tentang Bantuan Hukum yaitu UU Nomor 16 Tahun 2011 serta UU Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Profesi Advokat sebagai landasan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditetapkan atau dipilih oleh penulis dalam rangka penulisan skripsi ini adalah Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang. PERADI dipilih karena merupakan salah satu organisasi advokat terbesar di Indonesia.

### 4. Jenis Data dan Sumber Data

Data primer ini diperoleh dari responden yang berkompeten, dalam hal ini adalah dengan cara wawancara dengan advokat yang pernah memberikan bantuan hukum prodeo. Data Sekunder adalah data-data atau masukan-masukan sekitar masalah obyek yang disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang hendak dibahas.<sup>3</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara atau interview, melalui proses pengambilan data dengan meminta keterangan atau tanya jawab dengan responden atau petugas yang berwenang dengan menguasai perihal data yang akan dibahas. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Advokat yang pernah memberikan bantuan hukum. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, majalah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi yang ada di Kantor PERADI Cabang Malang mengenai permasalahan diatas.

### 6. Populasi dan Sampel

- 1) Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau yang akan diteliti. Dalam penelitian populasi yang akan meliputi Advokat yang menjadi anggota PERADI Cabang Malang.
- 2) Sampel adalah proses dalam memilih suatu bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi. Sampel dalam penelitian ini didasarkan pada para advokat di Kantor PERADI Cabang Malang yang telah melakukan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu, antara lain:

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalis, Jakarta, 1983, hlm 24.

- a) Alm. Waluyo Supardi Putro, SH
- b) Yudo Prihanto, SH
- c) Henru Purnomo, SH. MH

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data dalam secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>4</sup> Selanjutnya dari hasil pengolahan dan analisis penulisan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti untuk dapat memberikan rumusan-rumusan dan pengertian-pengertian terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum terhadap Terdakwa Tidak Mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Malang

Tujuan dari dilaksanakannya bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum antara lain :

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan;
2. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan;
3. Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan

---

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 172.

4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap kewajibannya.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Secara Cuma-Cuma, mewajibkan kepada setiap anggotanya di Malang Raya memberikan bantuan hukum gratis minimal 50 jam per tahun.

Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum setidaknya harus memuat:

1. Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Syarat yang perlu dilampirkan oleh masyarakat tidak mampu yang akan meminta bantuan hukum adalah:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemohon yang tidak bisa menulis atau tidak pandai menyusun redaksi permohonan atau bahkan mungkin buta huruf, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh advokat atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Permohonan yang diajukan langsung kepada advokat harus ada tembusannya kepada Organisasi Advokat yang bersangkutan.

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma namanya dicantumkan dalam jawaban tersebut.

Jika permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Ketentuan ini telah disebutkan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Tahap selanjutnya apabila sudah dinyatakan bersedia, dokumen yang telah dilengkapi tersebut diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan atau permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera atau sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan



pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus..

Selain advokat memberikan jasa hukum di dalam persidangan, advokat juga memberikan jasanya diluar sidang pengadilan. Sesuai PP Nomor 42 Tahun 2013, biaya kegiatan bantuan hukum litigasi PBH untuk satu perkara (pidana, perdata, atau tata usaha negara) hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat ditetapkan lima juta rupiah.

## **2. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum**

Dari tahun ke tahun masyarakat akan mengetahui kinerja advokat yang sebenarnya dan mereka akan merasa mendapatkan keadilan jika memang pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu itu terbukti berhasil secara efektif sebagai cerminan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kelima faktor untuk mengukur efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat seperti teori yang disebutkan Soerjono Soekanto, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, SEMA, Kode Etik Profesi, semuanya telah mengatur dan menyebutkan secara jelas segala hal yang terkait dengan hal tersebut.

Penegak hukumnya yaitu advokat meskipun ada saja yang belum terketuk hati nuraninya dalam membela masyarakat kurang mampu namun sebagian dari mereka juga sudah berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai kewajiban profesi dan

menganggap ini bagian dari ibadah karena menolong orang yang kesulitan tanpa pamrih. Mereka siap membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum tanpa mengharapkan imbalan namun harus tetap profesional tidak membedakan dengan klien lainnya.

Faktor sarana dan fasilitasnya juga sudah cukup mendukung. Fasilitas yang ada di PBH sudah tergolong layak meskipun belum sepenuhnya masyarakat yang jauh tinggal di pelosok desa dapat mengakses kantor ini. Sumber daya manusia yang berkualitas yaitu advokat yang sudah berpengalaman menangani berbagai perkara. Disini yang membuat efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu tidak dapat berjalan optimal dan efektif adalah faktor dari masyarakatnya.

Masyarakat tidak dengan mudahnya datang ke PBH untuk meminta bantuan saat mereka bermasalah dengan hukum. Ini dikarenakan tingkat kesadaran hukum mereka yang masih kurang dan mereka masih ragu dengan kinerja advokat yang mereka pahami selama ini bahwa advokat adalah profesi yang identik dengan uang. Mereka belum bisa memahami sepenuhnya hakikat dari didirikannya PBH untuk membantu mereka dalam memperoleh keadilan.

Ini berdampak pada faktor kebudayaan yang berkembang ditengah masyarakat yang akhirnya salah. Menjadi tugas advokat agar dapat meluruskan budaya masyarakat yang keliru tersebut. Mereka perlu terus meyakinkan masyarakat bahwa advokat sepenuhnya dapat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi tanpa meminta imbalan semata.

Kebanyakan kasus prodeo yang masuk ke Pos Bantuan Hukum PERADI Malang selama 4 tahun kebelakang adalah kasus narkoba dan terdakwa sendiri yang datang ke PBH untuk meminta bantuan dengan membawa persyaratan surat keterangan tidak mampu. Penulis dapat melihat bahwa mayoritas pelaku tindak pidana adalah golongan masyarakat menengah kebawah. Kendala selama proses hukum tidak dirasakan oleh advokat yang menangani perkara tersebut. Prosedurnya juga tidak jauh berbeda antara pemberian bantuan hukum biasanya dengan prodeo,

hanya saja tidak dipungkiri terkadang ada beberapa advokat yang malas untuk mondar mandir untuk keperluan perkara karena tidak adanya biaya transportasi dan akomodasi. Ini memang yang membuat sedikit lambat tetapi secara keseluruhan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma .

Tidak semua kasus bantuan hukum cuma-cuma masuk ke meja PBH PERADI Malang, karena ada kasus-kasus yang advokatnya langsung ditunjuk langsung oleh Pengadilan untuk mendampingi terdakwa tersebut dalam persidangan. Advokat memang dituntut untuk selalu siap kapanpun dan dimanapun apabila jasanya dibutuhkan.

### **3. Hambatan yang Dihadapi dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat di PERADI Cabang Malang**

Secara umum masih sulit bagi rakyat kecil untuk mengakses keadilan. Penyebabnya antara lain masih adanya sisi negatif dalam penegakan hukum yang menghantui rakyat kecil. Keraguan masyarakat untuk datang ke PBH juga karena *image* advokat yang seolah-olah tidak mau memberi bantuan jika tidak dibayar maupun mahalnnya jasa mereka dalam memberikan bantuan hukum. Masyarakat juga merasa mampu menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani perkaranya sendiri. Itulah yang membuat mereka akhirnya memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum.

Pihak penyidik sebenarnya sudah menyampaikan hak terdakwa agar didampingi penasehat hukum baik menyediakan sendiri maupun disediakan oleh penyidik sesuai amanat yang disebutkan dalam KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan seseorang berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan apabila ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, tetapi pada kenyataannya baik masyarakat sendiri merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri juga penyidik beranggapan beranggapan bahwa tidak perlu adanya penasehat hukum, karena hadirnya advokat justru dapat menghambat dan memperumit jalannya

proses penyidikan hingga ke pengadilan. Padahal sebenarnya fungsi advokat sangat penting dalam mendampingi terdakwa menjalani tiap proses hukum yang perlu dilalui. Apabila tersangka setuju untuk menghadapi masalahnya sendiri, penyidik akan langsung membuatkan berita acara penolakan didampingi penasehat hukum untuk dilampirkan dan ditandatangani tersangka atau terdakwa yang bersangkutan.

Hambatan lainnya yaitu munculnya pihak yang sebenarnya bukan advokat, namun menawarkan diri atau mengaku bisa menyelesaikan permasalahan hukum. Mereka yang disebut makelar kasus itu sebagai perantara antara calon klien dengan advokat yang nantinya membantu menyelesaikan perkara. Situasi seperti ini dapat dimanfaatkan mereka untuk mengambil untung lebih. Mereka menarik sejumlah biaya kepada klien dengan alasan untuk keperluan mengurus perkara, namun dia mengatakan pada advokat bahwa calon kliennya ini kurang mampu dan diharapkan mendapat bantuan hukum cuma-cuma. Uang yang sudah berada ditangan mereka dimanfaatkan sendiri.

Hambatan lain juga berasal dari advokatnya sendiri. Ada juga perilaku curang yang dilakukan yaitu ketika advokat telah menerima honor dari kliennya, namun kasusnya berhenti dan tidak segera ditangani. Uang kuasa yang telah diberikan oleh kliennya sejak kesepakatan awal dipergunakan namun dengan mengabaikan kewajiban yang seharusnya menuntaskan kasus yang ditanganinya tersebut. Perilaku semacam ini dapat ditindak oleh Dewan Kehormatan karena tergolong sudah melanggar kode etik advokat.

Hambatan berikutnya yaitu tidak seimbangnya jumlah pencari keadilan dengan advokat. Penyebarannya yang tidak merata, tidak menyebarnya advokat diseluruh pelosok tanah air dan terpusat di kota besar yang berakibat masyarakat miskin yang sebagian besar berada dipelosok-pelosok desa tidak bisa menjangkau bantuan hukum ini.

Hambatan selanjutnya yang timbul dari masyarakatnya sendiri juga beberapa kali ditemui. Mereka memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan

syarat dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Mereka datang ke PBH ditunjang dengan berpenampilan seolah-olah terlihat seperti masyarakat tidak mampu. Advokat juga tidak boleh dengan mudah percaya begitu saja, sehingga diperlukan tim untuk terjun langsung dalam melakukan observasi kepada calon kliennya supaya nantinya akan ketahuan siapa masyarakat yang sengaja memanfaatkan fasilitas ini dan mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum prodeo.<sup>5</sup>

Advokat sendiri tidak bisa memaksa masyarakat yang memerlukan bantuan hukum untuk datang ke PBH. Namun Advokat terutama yang berada dibawah naungan PERADI Malang terus melakukan berbagai upaya agar masyarakat tidak perlu ragu meminta bantuan hukum cuma-cuma kepada advokat.

#### **4. Upaya untuk Menanggulangi Hambatan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat**

Kebijakan PERADI terhadap anggotanya sebagai salah satu upaya meningkatkan semangat advokat untuk memberikan bantuan hukum gratis bagi warga tidak mampu. Bagi advokat yang memiliki klien tidak mampu, diharuskan mendaftarkan perkara yang ditanganinya itu. Bila ada advokat anggota PERADI di seluruh Indonesia yang tidak mau memberikan bantuan hukum cuma-cuma, paling sedikit 50 jam/tahun, yang bersangkutan dapat diajukan ke Dewan Kehormatan PERADI. Kewajiban memberi bantuan hukum cuma-cuma ini nantinya akan dijadikan salah satu syarat untuk memperpanjang kartu tanda pengenal advokat

Upaya lainnya yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sedini mungkin dan harus mempunyai program peningkatan mentalitas bagi para para advokat. Jika mentalitas para advokat baik, maka tidak akan melanggar kode etik yang ada. Jadi sikap profesionalisme sebagai advokat sangatlah penting.

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Henru Purnomo, SH. MH selaku Ketua Posbakum PERADI periode sebelumnya pada Hari Kamis, 6 November 2014 pukul 17.00

Peningkatan SDM Advokat sebagai profesi terhormat yang artinya anggota PERADI juga memiliki kompetensi dan berdaya saing tinggi, sehingga bisa disegani oleh mitra penegak hukum lain. Ini sebenarnya juga untuk membangun hubungan baik dengan penegak hukum lainnya.

Upaya yang tidak kalah penting dan terus menerus dilakukan yaitu sosialisasi sebagai bentuk upaya preventif melalui berbagai media cetak maupun elektronik, melalui LSM dan tokoh masyarakat, serta secara berkala memberikan materi penyuluhan dengan tema seperti KDRT, perkawinan, permasalahan tanah dan masalah TKI ditiap kecamatan di Kota Malang.<sup>6</sup>

## **E. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum namun belum dapat dikatakan efektif dan untuk mengukur efektivitas pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat ditentukan dari lima faktor diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diusahakan selalu profesional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi PBH dengan fasilitas yang layak dan memadai meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum dapat mengaksesnya, faktor masyarakat yang sasaraannya yaitu masyarakat Kota Malang dan sekitarnya yang ternyata kesadaran hukumnya masih rendah untuk mau dengan sukarela datang ke PBH meminta bantuan hukum serta

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Yudo Prihanto, SH selaku Direktur Pusat Bantuan Hukum PERADI pada Hari Kamis, 6 November 2014 pukul 16.30

faktor kebudayaan yaitu budaya yang diyakini masyarakat bahwa citra advokat sebagai profesi yang komersial dan kurang memihak pada rakyat kecil.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu antara lain mulai dari masyarakat merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan keraguan masyarakat untuk datang ke PBH karena citra advokat dimata mereka yang identik dengan uang, terlibatnya para makelar kasus yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan, penyebaran advokat yang kurang merata karena terfokus di pusat kota hingga masyarakat dipelosok desa sulit mengaksesnya, kemudian adanya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas ini dengan memalsu identitas dan berpura-pura sebagai masyarakat tidak mampu agar bisa mendapatkan bantuan hukum gratis.
3. Upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu, antara lain sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak dan elektronik sekaligus penyuluhan hukum secara berkala di berbagai kecamatan, peningkatan kualitas Sumber Daya Advokat terutama mentalitas dan kinerja advokat melalui kursus maupun saat Pendidikan Khusus Profesi Advokat, serta menjadikan kewajiban melakukan bantuan hukum prodeo ini sebagai syarat untuk memperpanjang kartu tanda pengenal advokat sebagai salah satu ketentuan ijin praktek.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukumnya untuk lebih memaknai pentingnya peran advokat disini terutama untuk membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan tanpa merasa adanya diskriminasi.

2. Bagi advokat diharapkan terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu supaya dapat dikatakan efektif, karena bagaimanapun peran aktif penegak hukum sangat dibutuhkan.
3. Bagi Lembaga Bantuan Hukum khususnya PBH PERADI Cabang Malang diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi dan peningkatan sarana prasarana yang ada di dalamnya demi menarik masyarakat agar dapat dengan suka rela datang kesana meminta bantuan hukum.
4. Bagi Pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi dengan baik jalannya pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat ini supaya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang telah dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), **Kode Etik Advokat Indonesia**, Jakarta Selatan, 2013.
- Ronny Hanitjo, Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalis, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.